

# BAB I

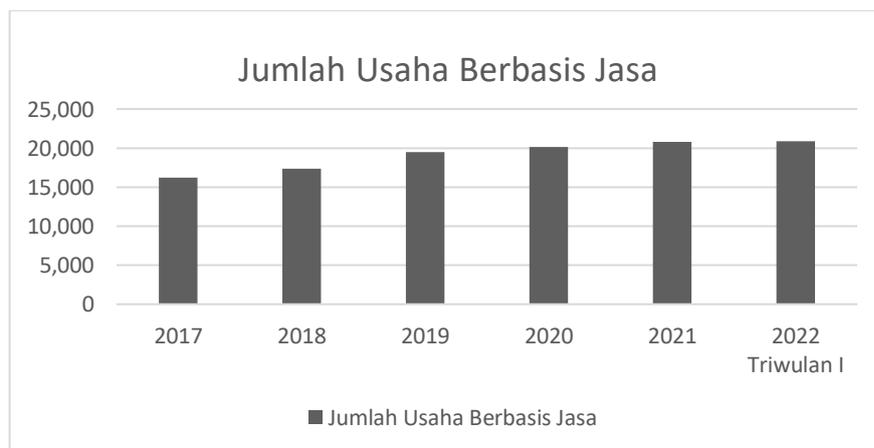
## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia terus mengalami perkembangan di berbagai sektor, salah satunya pada sektor jasa. Namun perkembangan tersebut juga diikuti oleh penurunan kualitas lingkungan yang dapat berpengaruh bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya akibat berbagai permasalahan lingkungan yang timbul. Perkembangan industri jasa yang terjadi menjadi salah satu penyebab munculnya permasalahan lingkungan hidup. Hal tersebut dipicu dengan jumlah industri di sektor jasa yang terus mengalami perkembangan signifikan. Di Jawa Tengah sendiri, usaha berbasis jasa terus mengalami peningkatan jumlah di setiap tahunnya, hal tersebut diketahui dari data yang dihimpun oleh Dinas Koperasi UMKM Provinsi Jawa Tengah.

**Gambar 1. 1**

**Data Peningkatan Jumlah Usaha berbasis jasa di Jawa Tengah**



Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah

Usaha berbasis jasa juga mengalami pertumbuhan signifikan di Kota Semarang. Perkembangan usaha berbasis jasa ini dipengaruhi oleh kebutuhan akan jasa yang terus meningkat. Sebagai kota yang berperan menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian, peningkatan jumlah penduduk terus terjadi di Kota Semarang yang akhirnya berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan jasa untuk memenuhi kebutuhan penduduk sehari-hari. Salah satu usaha berbasis jasa yang jumlahnya terus meningkat ialah usaha penatu yang bergerak pada pencucian pakaian dan barang-barang lainnya atau biasa disebut *laundry*. Usaha penatu ini merupakan salah satu dari bisnis berbasis jasa yang menjamur dengan berbagai tawaran jenis jasa didalamnya. Keberadaan usaha penatu ini selain membawa kemudahan bagi masyarakat juga memiliki potensi untuk dapat mengembangkan ekonomi masyarakat. Usaha penatu terus berkembang dengan berbagai inovasi yang ditawarkan dan terus meningkat keberadaannya di berbagai daerah salah satunya di Kota Semarang.

Jasa penatu ini terus berkembang karena perannya yang cukup meringankan beban masyarakat dalam melakukan kegiatan rumah tangga. Masyarakat perkotaan yang memiliki berbagai kesibukan dan banyak menghabiskan waktu di luar rumah, sebagian besar seringkali memanfaatkan jasa penatu sebagai solusi untuk efektivitas waktu. Usaha penatu biasanya menerima jasa pencucian baju, tas, celana, sepatu, selimut, boneka, dan barang-barang lainnya yang terbuat dari kain. Usaha penatu umumnya tersebar di pusat perkotaan, daerah padat penduduk, serta di dekat perguruan tinggi dan perkantoran yang biasanya terdapat indekost. Salah satu contohnya dapat dilihat dengan maraknya usaha penatu yang didirikan di Kota

Semarang. Keberadaan perguruan tinggi, industri, serta perkantoran kemudian membawa dampak pada keberadaan mahasiswa dan pekerja yang menjadi faktor meningkatnya keberadaan usaha penatu. Mahasiswa dan pekerja yang memiliki banyak kegiatan cenderung memilih untuk menggunakan jasa penatu dibandingkan harus mencuci sendiri. Harga jasa pencucian yang terjangkau dan waktu pengerjaan pencucian yang cepat juga menjadi alasan pendukung tingginya minat konsumen untuk menggunakan jasa penatu yang kemudian mempengaruhi kenaikan penyelenggaraan usaha penatu.

Maraknya pemanfaatan jasa penatu dapat meningkatkan penghasilan bagi pengelolanya dan juga menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Namun kemunculan usaha penatu ini juga berpotensi membawa dampak buruk bagi lingkungan yang akhirnya dapat berpotensi untuk mencemari lingkungan apabila tidak diikuti oleh pengelolaan limbah hasil pencucian dengan prosedur yang tepat dan akhirnya menciptakan permasalahan lingkungan.

Pencemaran lingkungan saat ini terus menjadi kekhawatiran bagi pemerintah pusat dan daerah. Di era ini banyak berbagai permasalahan lingkungan hidup yang disebabkan oleh manusia dan terus terjadi seiring dengan perkembangan zaman. Meningkatnya permasalahan lingkungan hidup sendiri disinyalir disebabkan oleh menguatnya paham antroposentrisme. Antroposentrisme dimaknai sebagai teori etika lingkungan yang memandang pusat alam semesta adalah manusia, sehingga kepentingan manusia paling menentukan dalam pengambilan kebijakan berkaitan

dengan alam secara langsung atau tidak.<sup>1</sup> Hal tersebut dapat diartikan bahwa manusia meyakini dirinya adalah makhluk paling penting dari segalanya dan menganggap kedudukannya lebih penting dari makhluk lain. Dengan kata lain konsep antroposentrisme adalah manusia merdeka dan menjadi pusat dari segala sesuatu.<sup>2</sup> Pemikiran inilah yang menjadikan manusia dan kepentingannya menjadi pusat yang paling mempengaruhi dalam menentukan tatanan ekosistem sehingga manusia menganggap dirinya dapat mengambil keuntungan dengan berperilaku apapun pada lingkungan, termasuk melakukan kegiatan dengan cara-cara yang dapat merusak lingkungan. Penggunaan bahan kimia yang dilakukan manusia juga menjadi penyebab yang memperparah terjadinya krisis lingkungan.

Banyak kegiatan manusia yang berpotensi menimbulkan kerusakan bagi alam, salah satu contohnya ialah maraknya pendirian usaha penatu di berbagai daerah, banyaknya usaha penatu berpotensi membawa dampak yang buruk bagi lingkungan apabila pengelolaan air limbah yang dihasilkan tidak dilakukan dengan benar. Padatnya lingkungan pemukiman dan kondisi sanitasi air yang buruk pada lingkungan tempat banyak usaha penatu beroperasi, serta limbah cair hasil dari usaha penatu yang langsung dibuang ke badan air tanpa proses pengolahan memiliki potensi besar menyebabkan pencemaran air pada sungai serta badan-badan air. Untuk itu diperlukan pengelolaan limbah cair dalam usaha Penatu.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Yuono, Y. R., "Melawan Etika Lingkungan Antroposentris Melalui Interpretasi Teologi Penciptaan Sebagai Landasan Bagi Pengelolaan-Pelestarian Lingkungan" *Fidei: Jurnal Teologi Sistematika dan Praktika*, Vol. 2 No. (1), (2019). 186-206..

<sup>2</sup> Junaidi Abdillah, "Dekonstruksi Tafsir Antroposentrisme", *Kalam*, Vol. 8 No. 1, (Juni, 2014) hlm 69.

<sup>3</sup> Usaha Laundry : Mencuci, menghindari limbah, mendatangkan rezeki.  
<https://chub.fisipol.ugm.ac.id/2020/12/21/usaha-laundry-mencuci-menghindari-limbah-mendatangkan-rezeki> diakses pada 14 November 2022.

Penggunaan bahan kimia yang dilakukan dalam proses pencuciannya dan pembuangan limbah yang langsung dibuang baik ke saluran air maupun ke lahan kosong tanpa melalui proses pengelolaan pada instalasi limbah apabila terus dilakukan akan berpotensi mencemari lingkungan.

Air limbah yang dihasilkan usaha penatu yang mengandung sisa detergen akan menimbulkan permasalahan yang serius karena adanya kandungan bahan kimia yang dapat mencemari lingkungan. Buangan sisa detergen yang terus dihasilkan dalam volume besar akan berdampak buruk bagi kelestarian sungai dan tanah. Selain efek toksik, limbah hasil dari usaha penatu yang berlebihan dapat mencemari badan air dan menyebabkan eutrofikasi, yaitu keadaan air yang menjadi kaya akan nutrisi terlarut dan menurunkan kadar oksigen terlarut serta daya dukung air bagi kehidupan biota air.<sup>4</sup>

Dampak utama dari limbah cair dari usaha penatu adalah pencemaran air, terlebih jika usaha penatu tersebut tidak memiliki tempat pengolahan limbah, hal ini dapat menyebabkan limbah cair tersebut dibuang ke saluran air rumah tangga dan akhirnya ke sungai, atau ke dalam tanah, sehingga merusak air tanah. Hal ini tidak hanya berbahaya bagi lingkungan tetapi juga bagi makhluk hidup lain, karena limbah cair yang dihasilkan oleh usaha penatu mengandung fosfat dan klorin<sup>5</sup>. Kedua zat tersebut juga berbahaya karena zat tersebut dapat menimbulkan berbagai penyakit pada manusia, antara lain penyakit dalam, batuk, dan iritasi langsung pada

---

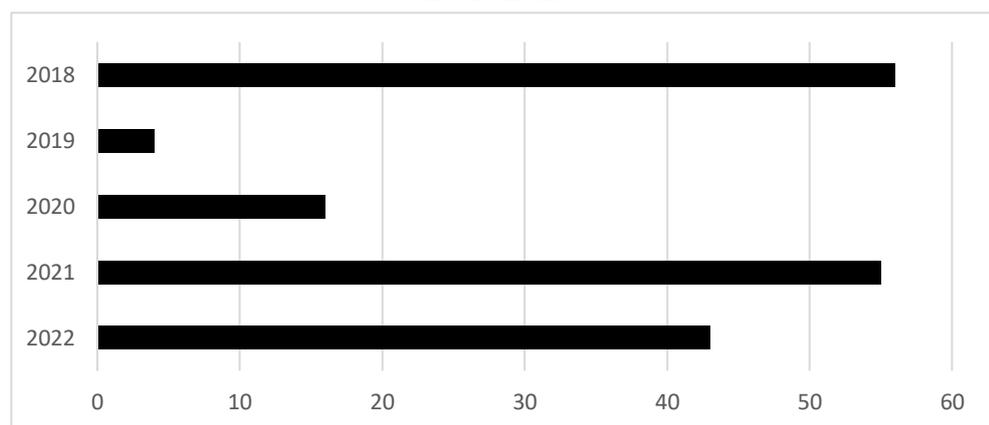
<sup>4</sup> Raissa, D.G. dan Tangahu, B. V., "Fitoremediasi Air yang Tercemar Limbah Laundry dengan Menggunakan Kayu Apu", *Jurnal Teknik ITS*, Vol. 6, No. 2, (2017) 232-236.

<sup>5</sup> Sri Widya Astuti dan Mersi Suriani Sinaga "Pengolahan Limbah Laundry Menggunakan Metode Biosand Filter Untuk Mendegradasi Fosfat", *Jurnal Teknik Kimia USU*, Vol.4, No.2 (2015)

kulit.<sup>6</sup> Terlebih dengan peningkatan jumlah usaha penatu yang menjamur dan berpengaruh pada peningkatan jumlah limbah yang dihasilkan. Tentunya hal tersebut dapat mengakibatkan krisis lingkungan.

Menurut data yang dihimpun oleh Satu Data Kota Semarang, sejak tahun 2020 jumlah lokasi pencemaran air yang ada di Kota Semarang terlihat kembali meningkat. Jumlah usaha laundry yang juga terus meningkat dari tahun ke tahun dapat menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi bertambahnya jumlah lokasi pencemaran air di Kota Semarang.

**Gambar 1. 2 Jumlah Lokasi Pencemaran Air di Kota Semarang dari Tahun ke Tahun**



Sumber : Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang

Terjadinya perpindahan Kampus Universitas Diponegoro dari kampus yang berlokasi di Pleburan ke kawasan Tembalang pada tahun 2010-an membuat kepadatan penduduk Tembalang meningkat drastis. Selain itu terdapat perguruan tinggi lainnya yang menjadikan Kecamatan Tembalang dan Kecamatan Banyumanik menjadi kawasan padat penduduk dengan dihuni lebih dari 65.000 mahasiswa.

<sup>6</sup> Zat Berbahaya dalam Limbah Laundry <http://jogja.tribunnews.com/2015/05/04/zat-berbahaya-dalam-limbah-laundry>, diakses terakhir tanggal 14 November 2022.

**Tabel 1. 1 Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi di Kecamatan Tembalang dan Kecamatan Banyumanik**

No.	Nama Perguruan Tinggi	Alamat	Jumlah
1.	Politeknik Kesehatan Semarang	Jalan Tirto Agung, Pedalangan, Banyumanik. Kota Semarang	4. 619
2.	Politeknik Negeri Semarang	Jalan Prof. Soedarto, Tembalang, Kota Semarang	4. 536
3.	Universitas Diponegoro	Jalan Prof. Sudarto No.13, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang	43.357
4.	Universitas Karya Husada	Jl. R. Soekanto No.46, Sambiroto, Kec. Tembalang, Kota Semarang	1.596
5.	Universitas Muhammadiyah Semarang	Jl. Kedungmundu No.18, Kedungmundu, Kec. Tembalang, Kota Semarang	12.298
6.	Universitas Pandanaran	Jl. Banjarsari Barat No.1, Pedalangan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang	1.269
Jumlah			67.678

Sumber : Data Diolah

Dari tabel yang ditampilkan Universitas Diponegoro sendiri menyumbang jumlah mahasiswa paling besar, yang menampung lebih dari 43.357 mahasiswa<sup>7</sup> dan ditambah lagi dengan keberadaan berbagai perguruan tinggi lainnya seperti Politeknik Negeri Semarang, Politeknik Kesehatan Semarang, Universitas Karya Husada, Universitas Islam Muhammadiyah Semarang, dan Universitas Pandanaran. Kawasan Kecamatan Tembalang dan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang ini juga terdapat banyak kompleks perumahan dan pemuian penduduk seperti Perumahan Taman Setia Budi, Vila Aster, Permata Hijau, Graha Estika, Tembalang Pesona Asri dan masih banyak lagi. Jumlah penduduk yang bermukim di

<sup>7</sup>Banyaknya Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi Negara (PTN) Menurut PTN di Jawa Tengah (Jiwa), <https://jateng.bps.go.id/indicator/28/322/1/banyaknya-mahasiswa-pada-perguruan-tinggi-negara-ptn-menurut-ptn-di-jawa-tengah-.html>, diakses terakhir tanggal 10 Mei 2023

Tembalang dan Banyumanik sendiri mencapai 331.756 jiwa menurut data yang dihimpun oleh BPS Kota Semarang.<sup>8</sup>

Dengan tingginya jumlah penduduk yang ada di Tembalang dan Banyumanik ini menimbulkan peluang bisnis baru yaitu jasa pencucian atau usaha penatu. Ditambah lagi dengan segmentasi yang selaras dengan kondisi konsumen usaha penatu yang ada di Kecamatan Tembalang dan Kecamatan Banyumanik juga menjadi salah satu faktor pendorong makin suburnya bisnis usaha penatu pada Kecamatan Tembalang dan Banyumanik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Andi S, dkk pada tahun 2013, diketahui bahwa terdapat 586 nama usaha penatu yang berada di Kota Semarang. Dengan terus terjadinya perkembangan dan dinamika yang ada, maka di tahun 2023 ini tentu saja jumlah usaha penatu semakin bertambah. Sementara jumlah usaha penatu yang ada pada Kecamatan Tembalang dan Kecamatan Banyumanik berdasarkan observasi tidak kurang dari 100 unit usaha.

Dinas Lingkungan hidup juga menyebutkan dalam penyusunan rencana strategis bahwa akar permasalahan yang harus diselesaikan berkaitan dengan pencemaran air yaitu tingginya beban cemaran yang masuk ke sungai mengakibatkan semakin tingginya pencemaran air, kualitas air sungai dan anak sungai di 16 sungai yang berada di Kota Semarang berada pada status cukup cemar. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku industri

---

<sup>8</sup> Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk (Jiwa/km<sup>2</sup>), 2020-2022, <https://semarangkota.bps.go.id/indicator/12/48/1/kepadatan-penduduk.html>, diakses terakhir tanggal 10 Mei 2023

terkait penanganan limbah sehingga terjadi pencemaran air.<sup>9</sup> Untuk itu Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan penyusunan rencana strategis akibat temuan permasalahan pencemaran air di Kota Semarang sehingga akan dilakukan upaya dengan Penurunan bahan pencemar yang masuk ke sungai yang ada di Kota Semarang. Rencana strategis ini direalisasikan dengan dilakukannya pengetatan baku mutu air limbah serta pengelolaan air limbah domestic dari usaha kecil dan menengah (UKM), pemantauan serta pengawasan sumber-sumber pencemar, serta sosialisasi pengelolaan mata air dan sungai dalam upaya meningkatkan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan di Kota Semarang.

Kemunculan usaha penatu yang jumlahnya terus meningkat dan tidak diikuti oleh ketaatan pada kebijakan pengelolaan limbah cair yang telah ditetapkan pemerintah dapat memberikan dampak besar yang buruk bagi lingkungan. Pemilik usaha penatu yang tidak melakukan kepengurusan izin pengelolaan limbah ini juga menjadi pihak dianggap kurang memiliki tanggung jawab lingkungan yang baik. Apabila pembuangan limbah cair secara langsung tanpa pengolahan terus dilakukan oleh pengelola usaha penatu tanpa adanya pengawasan serta pengelolaan limbah yang baik, maka hal ini jelas dapat menimbulkan potensi pencemaran lingkungan. Pemerintah telah mengatur pengendalian lingkungan pada Pasal 1 ayat (14) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup yang menyatakan bahwa a Pasal 1 ayat (14) Undang-undang

---

<sup>9</sup> Pradhana, dkk., *Analisis Kualitas Air Sungai Bringin Kota Semarang Menggunakan Metode Indeks Pencemaran*, (2014) (Doctoral dissertation, Diponegoro University).

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa:

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.<sup>10</sup>

Limbah cair hasil dari usaha penatu yang langsung dibuang tanpa dilakukan pengolahan merupakan unsur yang memenuhi pasal 1 ayat 14 yaitu pencemaran lingkungan hidup, sehingga dalam hal pengelolaan usaha penatu diduga terdapat potensi pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh kurangnya pengelolaan limbah hasil cucian yang diikuti dengan jumlah usaha penatu yang terus semakin bertambah.

Dalam menghadapi permasalahan ini, pemerintah memberikan ketentuan pada pelaku usaha dengan adanya Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), karena untuk bisa mendirikan usaha yang memberikan dampak pada lingkungan setidaknya pengusaha harus memiliki dokumen SPPL. Dokumen SPPL ini dapat memastikan usaha penatu berjalan sesuai dengan ketentuan khususnya terkait pengelolaan limbah yang dihasilkan. SPPL merupakan bentuk kesanggupan dari penanggung jawab usaha atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan serta pemantauan lingkungan terhadap dampak yang ditimbulkan dari usahanya. Dokumen ini diperlukan jika usaha atau kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL atau UKL-UPL. Sebagai contoh, jika usaha memiliki dampak lingkungan yang cukup kecil, namun tetap memerlukan pengelolaan lingkungan

---

<sup>10</sup> Pasal 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

yang baik, maka SPPL dapat menjadi alternatif. SPPL terdiri dari satu hingga dua lembar surat pernyataan yang menunjukkan komitmen untuk mengelola dan memantau dampak lingkungan. SPPL ini diarahkan untuk dapat memastikan bahwa tiap usaha atau kegiatan dapat berjalan dengan meminimalkan dampak negatif pada lingkungan hidup.

Terkait keharusan untuk melakukan kepengurusan SPPL ini diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dalam pasal 35 yang berisi.<sup>11</sup>:

- “(1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.  
(2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria :
- a. tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1); dan
  - b. kegiatan usaha mikro dan kecil”

SPPL ini juga menjadi hal yang ditekankan pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yang disebutkan pada pasal 4 yang berbunyi :

- “Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki:
- a. Amdal;
  - b. UKL-UPL; atau
  - c. SPPL.”

Hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban kepengurusan dokumen lingkungan ini juga disebutkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Pasal 7 yang menyebutkan bahwa :

- “(1) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c wajib dimiliki bagi usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki dampak penting

---

<sup>11</sup> Pasal 35 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

terhadap Lingkungan hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL.

2) Rencana usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting dan tidak wajib UKL-UPL;
- b. merupakan Usaha dan/atau kegiatan Usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki dampak penting terhadap Lingkungan Hidup; dan/atau
- c. termasuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang dikecualikan dari wajib UKL-UPL.”

Untuk itu peran pemerintah dalam mengawal permasalahan pengelolaan limbah cair dari usaha penatu ini sangat diperlukan, dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengaturnya di dalam BAB IX dimana disebutkan bahwa hal tersebut adalah mencakup tugas dan wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Serta telah dijabarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 di dalam BAB X terkait pembinaan dan pengawasan dan pada BAB IX tentang tata cara penerapan sanksi administratif perizinan berusaha atau pertesetujuan pemerintah.

Banyaknya usaha penatu yang berdiri di kawasan Tembalang dan Banyumanik Kota Semarang yang sebelumnya telah dijelaskan kemudian menciptakan kekawatiran terkait adanya pencemaran lingkungan dari pembuangan limbah usaha penatu. Dalam upaya untuk menjaga lingkungan hidup dan memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Semarang, Dinas Lingkungan Hidup menjadikan kebijakan tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang ada dalam undang-undang untuk menjadi pedoman. Kebijakan ini di dalamnya mengatur terkait pengawasan, perizinan, pembinaan yang dilakukan pada kegiatan usaha yang ada. Dalam hal ini, dilaksanakan pada

pengelolaan limbah yang dilakukan oleh pemilik usaha penatu, khususnya usaha penatu di Kota Semarang yang ada di Kecamatan Tembalang dan Kecamatan Banyumanik. Keberjalanan implementasi dari kebijakan ini penting untuk diketahui untuk menilai sejauh mana tanggung jawab yang dimiliki oleh para pemilik usaha penatu dalam penyelenggaraan usahanya, yang pada masalah ini mencakup pengolahan limbah usaha penatu yang ada pada Kota Semarang. Implementasi dari kebijakan ini juga dapat menilai sejauh mana Dinas Lingkungan hidup melakukan pengawasan, pembinaan, dan perizinan pada pengelolaan limbah penyelenggaraan usaha penatu di Kota Semarang, khususnya pada Kecamatan Tembalang dan Banyumanik.

Sesuai uraian tersebut, hal ini dirasa sangat penting untuk dilakukan penelitian mengenai keberjalanan kebijakan pengendalian lingkungan hidup di Daerah Kota Semarang, khususnya dalam pengelolaan limbah cair yang dihasilkan usaha penatu. Untuk menganalisis kebijakan tersebut maka penelitian ini akan membahas tentang implementasi dari kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah cair usaha penatu dengan judul “Kebijakan Pengendalian Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pengelolaan Limbah Cair Usaha Penatu Di Kota Semarang)”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka penelitian ini akan membahas mengenai :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengendalian Lingkungan Hidup terkait pengelolaan limbah cair usaha penatu di Kota Semarang?

2. Apa faktor penghambat dalam pengimplementasian kebijakan Pengendalian Lingkungan Hidup pada pengelolaan limbah cair usaha penatu di Kota Semarang?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Dalam merumuskan suatu tujuan penelitian, penelitian berpegang kepada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa permasalahan implementasi kebijakan pengendalian lingkungan Hidup, khususnya terkait pengelolaan limbah cair usaha penatu di Kota Semarang.
2. Untuk menganalisa faktor penghambat dalam pengimplementasian kebijakan pengendalian lingkungan pada pengelolaan limbah cair usaha penatu di Kota Semarang.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung dan tidak langsung bagi banyak pihak sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat untuk bisa menambah literatur, referensi, serta wawasan pengetahuan dalam Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang memiliki keterkaitan dengan keberhasilan dari Implementasi kebijakan dalam menangani permasalahan yang sedang terjadi serta dapat memberikan ilmu

pengetahuan dan wawasan kepada pelaku usaha penatu tentang melakukan pengelolaan pada limbah cair yang dihasilkan oleh usaha yang dioperasikannya.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Masyarakat

Diharapkan para pelaku usaha penatu yang merupakan bagian dari masyarakat dapat melakukan pengelolaan limbah cair yang dihasilkan dari usaha penatu yang dioperasikannya. Dengan adanya kebijakan pengendalian lingkungan hidup terkait pengelolaan limbah cair maka para pelaku usaha penatu dapat melakukan pengelolaan limbah sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Adanya implementasi yang baik dari kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah bersama pihak-pihak terkait dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan menghindari terjadinya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah cair hasil dari usaha penatu di Kota Semarang.

### b. Bagi Pemerintah

Memberikan kontribusi pada pemangku kepentingan dalam mengetahui pengimplementasian kebijakan pengendalian lingkungan hidup yang telah disahkan khususnya pada kebijakan pada pengelolaan limbah usaha penatu yang ada di Kota Semarang.

## 1.5 Penelitian Terdahulu

Untuk dapat menjamin keaslian dari hasil karya ilmiah sebuah penelitian, maka diperlukan adanya perbandingan antara penelitian yang dilakukan dengan

penelitian terdahulu yang sebelumnya telah dilakukan, Perbedaan tersebut dapat dibedakan dari judul, tahun, tujuan, lokasi, metode, serta hasil dari penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu ini juga diperlukan sebagai bahan referensi yang dapat mendukung hasil karya ilmiah yang dibuat. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang menjadi referensi untuk membuat karya ilmiah yang berjudul “Kebijakan Pengendalian Lingkungan Hidup Pada Pengelolaan Limbah Cair Usaha Perhotelan di Kota Semarang”, yaitu :

1. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Oki Oktami Yuda dan Eko Priyo Purnomo dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Limbah Cair Hotel di Kota Yogyakarta Tahun 2017“. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif, yang menggunakan jenis dan sumber data dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair hotel di Kota Yogyakarta tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status implementasi kebijakan pengendalian pencemaran cairan limbah industri perhotelan di Kota Yogyakarta pada tahun 2017. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengendalian pencemaran cairan limbah industri perhotelan di Kota Yogyakarta pada tahun 2017 berjalan dengan baik di Kota Yogyakarta. Hal ini terlihat dari pencapaian kinerja yang hampir mencapai target, pemanfaatan anggaran yang efisien, dan penyediaan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai. Selain itu, standar operasional prosedur penegakan kebijakan tersebut diketahui sudah jelas. Namun terdapat hambatan dalam implementasi kebijakan tersebut yaitu kurangnya sumber daya

manusia sehingga menghambat kegiatan pemantauan dari implementasi kebijakan pengendalian limbah cair.<sup>12</sup>

2. Penelitian terdahulu lainnya ditulis oleh Yuki Aliffenur Romadhon pada tahun 2017 dengan judul “Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Dalam Penanganan Limbah Batik Di Kota Pekalongan”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan studi pustaka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang pengelolaan air limbah dapat ditinjau berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan. Secara keseluruhan, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Limbah Industri Batik telah dilaksanakan. Menurut Perda Nomor 9 Tahun 2015, terdapat tiga prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu prinsip keadilan antar generasi, prinsip memadukan perlindungan lingkungan hidup dengan pembangunan, dan prinsip pencegahan terlebih dahulu. Keberjalanan dari kebijakan ini sudah berjalan baik, namun pemanfaatan IPAL publik belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga mengakibatkan baku mutu air menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya yang menandakan sungai telah tercemar.<sup>13</sup>
3. Penelitian berikutnya ditulis oleh Syarifha Khasna berjudul “Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Limbah Batik di Kota Pekalongan”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

---

<sup>12</sup> Yuda, O. O., dan Purnomo, E. P., “Implementasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Limbah Cair Hotel di Kota Yogyakarta Tahun 2017”, *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, Vol. 8, No, 2, (2018) 163-171.

<sup>13</sup> Romadhon, Y. A., “Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Dalam Penanganan Limbah Batik Di Kota Pekalongan”, *Insignia: Journal of International Relations*, Vol.4 No.2,(2017) 49-64.

deskriptif kualitatif. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan kebijakan pengelolaan limbah yang telah dilakukan. Dari penelitian yang sudah dilakukan, diketahui bahwa kebijakan pengelolaan limbah batik di Kota Pekalongan tidak berjalan baik. Hal ini terjadi karena terdapat hal yang bertentangan dengan beberapa indikator yang belum berhasil dicapai, antara lain ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan dana, fasilitas yang kurang memadai, metode yang digunakan tidak efektif, tidak jelasnya tujuan yang ingin dicapai karena tidak jelasnya peraturan, sehingga pelaksanaannya kurang membuahkan hasil. Terdapat ketidaksesuaian hasil dengan target yang telah ditetapkan, jumlah pelaku kebijakan belum mencapai target yang diharapkan, dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan pengelolaan limbah batik di Kota Pekalongan sulit dilaksanakan dan secara umum masyarakat Kota Pekalongan khususnya para pengusaha batik kurang konsisten dalam melaksanakan kebijakan tersebut.<sup>14</sup>

4. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Futiha Nazar, Sutarto Mochtar, Ely Sufianti, Endang Wirjatmitrilestari, dan Edah Jubaedah dengan judul “Analisis Implementasi Kebijakan Pengendalian Pembuangan Limbah Cair Domestik Ke Badan air Penerima Di Kabupaten Purwakarta”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021 dengan pendekatan kualitatif non eksperimen yang bersifat studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengendalian pembuangan limbah cair domestik ke badan air penerima di

---

<sup>14</sup> Khasna, S., “Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Limbah Batik di Kota Pekalongan”, *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Vol. 4, No. 1, (2021) 28-36.

Kabupaten Purwakarta. Hasil kajian yang dilakukan mengungkapkan bahwa belum adanya kebijakan pengendalian pembuangan limbah cair domestik di Kabupaten Purwakarta karena belum adanya peraturan mengenai pengelolaan air limbah domestik. Selama ini air limbah domestik dibuang langsung ke saluran/selokan dan sungai/sungai karena kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap dampak air limbah domestik terhadap pencemaran air. Untuk mengatasi permasalahan yang ada, kinerja sumber daya manusia, alokasi anggaran dan kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat harus dioptimalkan..<sup>15</sup>

5. Penelitian kelima ditulis oleh Petrus Nugro Rahardjo yang berjudul “Kajian Aspek Kebijakan dan Regulasi dalam Masalah Pengelolaan Limbah Cair Industri Rumah Tangga”. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan melakukan survey lapangan dan wawancara dengan pelaku kegiatan. Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini yaitu untuk dapat mengkaji dan mengatasi masalah pengelolaan limbah cair industri rumah tangga yang terjadi di perkotaan dipandang dari aspek kebijakan dan regulasi. Penelitian ini memberikan hasil bahwa regulasi dan kebijakan yang ada sudah cukup untuk dapat mengatasi permasalahan pencemaran. Namun dalam hasil penelitian di lapangan ditemukan hasil bahwa masih ada kurangnya koordinasi antarlembaga. Kelemahan tersebut menyebabkan ketidakefisienan dalam

---

<sup>15</sup> Nazar, F., dkk, “Analisis Implementasi Kebijakan Pengendalian Pembuangan Limbah Cair Domestik Ke Badan Air Penerima Di Kabupaten Purwakarta”, *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol.1 No 12, (2021). 30-37.

menanggulangi masalah pencemaran. Selain itu tidak dilakukan pemantauan kualitas lingkungan air secara berkala.<sup>16</sup>

Penelitian terdahulu yang dijadikan referensi ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu pada tema penelitian yang membahas terkait kebijakan pengelolaan limbah cair. Kesamaan topik yang diangkat pada penelitian sebelumnya mengisyaratkan bahwa topik terkait kebijakan pengelolaan limbah cair ini memiliki urgensi untuk dibahas lebih lanjut. Selain itu metode yang digunakan pada penelitian terdahulu sama dengan metode penelitian yang dilakukan yaitu metode penelitian kualitatif.

Perbedaan penelitian terdahulu yang sebelumnya telah disajikan dengan penelitian yang dilakukan ada pada pemilihan judul, waktu dan lokasi penelitian, tujuan, serta perbedaan perkembangan subjek target dari pengelolaan limbah cair. Beberapa penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa kebijakan pengelolaan limbah cair pada masing-masing subjek yang diteliti telah berjalan dengan baik. Serta beberapa menyebutkan bahwa implementasi dari kebijakan pengelolaan limbah cair masih menemui hambatan. Penelitian ini akan membahas terkait kedua hal tersebut dengan mengkaji pada usaha penatu yang ada di Kota Semarang.

## **1.6. Kerangka Teori**

### **1.6.1. Kebijakan Publik**

Kebijakan publik menurut Laswell dan Kaplan ialah merupakan suatu program, yang diproyeksikan dengan tujuan tertentu, nilai tertentu, dan juga

---

<sup>16</sup> Rahardjo, P. N., "Kajian Aspek Kebijakan dan Regulasi dalam Masalah Pengelolaan Limbah Cair Industri Rumah Tangga", *Jurnal Air Indonesia*, Vol. 2 No.4. (2018).

praktik-praktik tertentu (*a projected program of goals, values, and practices*).<sup>17</sup> Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai apapun yang dipilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Selain itu kebijakan publik juga memiliki artian sebagai apa yang dilakukan pemerintah, mengapa pemerintah melakukannya, serta apa perbedaan yang dibuatnya.<sup>18</sup>

Suharno menuturkan bahwa proses pembuatan kebijakan merupakan hal yang rumit dan kompleks. Para administrator, institusi, atau lembaga dituntut untuk memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau keahlian, sehingga dapat membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan (*intended risk*) maupun yang tidak diharapkan (*unintended risk*).<sup>19</sup>

Kebijakan publik sendiri merupakan sebuah tindakan yang mengarah pada tujuan yang digagas oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>20</sup> Kebijakan publik ialah tiap keputusan yang ditetapkan oleh negara yang digunakan sebagai strategi untuk dapat merealisasikan tujuan yang ingin dicapai oleh negara.

Kebijakan publik merupakan suatu hal yang hanya dapat ditetapkan oleh pemerintah, pihak-pihak lain diluar pemerintahan atau biasa disebut aktor aktor kebijakan publik hanya dapat mempengaruhi proses kebijakan publik dalam batas

---

<sup>17</sup> Riant Nurgroho, *Public Policy*, (Jakarta: PT Gramedia, 2012) Hlm 112.

<sup>18</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*, (Yogyakarta: CAPS, 2012) Hlm 20.

<sup>19</sup> Suharno. *Dasar-dasar Kebijakan Publik (Kajian Proses dan Analisis Kebijakan)*, (Yogyakarta: UPT Negeri Yogyakarta, 2008) Hlm 52.

<sup>20</sup> Dye dalam Dwiyanto Indiahono, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, (Yogyakarta : Gava Media, 2009), Hlm. 17

kewenangannya masing-masing. Kebijakan publik dapat disimpulkan sebagai sebuah kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam rangka pengambilan keputusan untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan publik. Keputusan yang diambil pemerintah dapat memberikan dampak untuk dapat mencapai tujuan dari negara dan menciptakan kedamaian kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terdapat dua bentuk dari kebijakan publik, yang pertama ialah kebijakan publik yang terkodifikasi adalah segenap peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 mengatur jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:<sup>21</sup>

- “ 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Tap MPR
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”

Bentuk kebijakan publik yang kedua adalah pernyataan pejabat publik yang berupa pernyataan-pernyataan dari pejabat publik di depan publik, baik dalam bentuk pidato tertulis, pidato lisan, termasuk pernyataan kepada media massa.

### **1.6.2. Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan proses kebijakan publik yang mengarah pada implementasi kebijakan yang telah dikembangkan. Implementasi kebijakan dalam praktiknya merupakan masalah yang kompleks; Tidak jarang implementasi suatu kebijakan melibatkan berbagai intervensi dari kepentingan tertentu. Pada

---

<sup>21</sup> Riant Nurgroho, *Public Policy, Op.Cit.* Hlm.131

prinsipnya implementasi kebijakan merupakan sarana bagi kebijakan untuk mencapai tujuannya. Untuk melaksanakan suatu kebijakan publik ada dua langkah pilihan yang dapat dilakukan, langkah pertama adalah mengimplementasikannya secara langsung dalam bentuk program-program, atau melalui perumusan kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik itu sendiri.<sup>22</sup>

Implementasi kebijakan adalah sebuah proses yang dinamis. Dalam hal ini implementasi kebijakan merupakan tujuan utama untuk mengetahui apakah kebijakan yang ada saat ini telah dilaksanakan dengan baik melalui suatu proses yang dapat dilaksanakan oleh kegiatan yang akan menghasilkan tujuan tersebut, dan untuk mengetahui apakah tujuan dan sasaran tersebut konsisten dengan alasan kebijakan itu dibuat. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam tahapan kebijakan karena melalui tahapan seluruh proses kebijakan dapat diketahui dan dipengaruhi oleh tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan.

Efektivitas implementasi kebijakan tidak lepas dari peran tiga hal yakni tujuan, pelaku, dan isi serta latar belakang konteks kebijakan. Dalam hal ini peneliti lebih fokus pada aktor implementasi kebijakan karena subjek tersebut bersifat formal dan penting dalam implementasi kebijakan. Terkait aktor, peneliti menyoroti penelitian yang dilakukan oleh James Anderson dalam buku *Making Public Policy* tahun 2013, yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan melibatkan banyak aktor

---

<sup>22</sup> Riant Nugroho. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. (Yogyakarta, Pustaka. Pelajar, 2014)

yang berbeda. Aktor yang berpartisipasi adalah birokrasi, legislatif, eksekutif, yudikatif, kelompok kepentingan, organisasi masyarakat dan warga negara.

Menurut Edward III implementasi kebijakan memiliki sifat kompleks dan kerjasama dari banyak pihak. Apabila terdapat struktur birokrasi yang tidak kondusif pada implementasi dari suatu kebijakan maka akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan.<sup>23</sup>

Implementasi kebijakan merupakan faktor terpenting yang menentukan keberhasilan kebijakan. Tanpa implementasi, kebijakan publik hanya akan menjadi sebuah dokumentasi belaka. Hal penting lainnya dalam implementasi kebijakan adalah tidak semua kebijakan yang disahkan dan disetujui Pemerintah otomatis dilaksanakan sesuai dengan tujuan kebijakan. Dalam pandangan Edwards III, komunikasi, sumber daya, tata letak, dan struktur birokrasi dapat mempengaruhi implementasi kebijakan secara langsung atau tidak langsung. Pengaruh tidak langsung yang dimaksud memungkinkan kita untuk memahami bahwa faktor-faktor ini mungkin bergantung satu sama lain dalam mempengaruhi implementasi kebijakan.<sup>24</sup>

a. Komunikasi

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah komunikasi. Pengambil keputusan harus memiliki pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan. Edward III menggunakan tiga variabel untuk mengukur keberhasilan komunikasi. Transimisi adalah variabel pertama, di mana

---

<sup>23</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Op.Cit. Hlm 152

<sup>24</sup> Syariffudin, A., dkk, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Kawasan Pariwisata Pantai Widuri dalam Perspektif. *Unnes Political Science Journal*, (2018). 2(1), 1-11.)

penyebaran komunikasi yang baik akan mengarah pada implementasi kebijakan yang baik juga. Untuk mengurangi distorsi implementasi, tujuan dan sasaran kebijakan harus dikomunikasikan kepada kelompok sasaran. Yang kedua, komunikasi harus jelas. Kelompok sasaran dapat menentang suatu kebijakan jika tujuan dan sasarannya tidak jelas atau tidak diketahui sama sekali. Yang terakhir, perintah pelaksanaan kebijakan harus konsisten, sehingga tidak ada kebingungan di lapangan.

b. Sumber daya

Kepemilikan sumber daya memungkinkan organisasi untuk beroperasi. Sumber daya dibagi menjadi sumber daya manusia, sumber daya material, dan sumber daya uang. Sumber daya manusia dapat termasuk buruh, insinyur, akuntan, perawat, dan lain-lain. Sumber daya material termasuk peralatan, bangunan, fasilitas material, kantor, dan persediaan. Uang tunai, pembiayaan utang, investasi, dan keuntungan penjualan adalah bagian dari sumber daya finansial.

c. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Proses implementasi kebijakan akan efektif jika implementor memiliki disposisi yang baik dan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Namun, jika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, proses implementasinya juga akan tidak efektif. Di antara berbagai bentuk penolakan, Edward III menciptakan "zona ketidakacuhan" di mana para pelaksana kebijakan menggunakan diskresi, atau keleluasaan, untuk dengan halus

menghambat pelaksanaan kebijakan dengan mengacuhkan, menunda, dan tindakan penghambatan lainnya.<sup>25</sup>

#### d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan sangat memengaruhi implementasi kebijakan. Adanya prosedur operasi standar, juga dikenal sebagai SOP, adalah komponen struktur yang penting dari setiap organisasi. SOP berfungsi sebagai pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang cenderung membuat pengawasan menjadi lebih lemah dan menyebabkan proses birokrasi yang rumit dan kompleks. Pada gilirannya, aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

### 1.6.3. Teori Kepatuhan

Ada beberapa teori yang menjelaskan kepatuhan, diantaranya adalah teori compliance dan teori obedience. Kerumitan terjadi karena pada umumnya dua istilah di atas sama-sama diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai kepatuhan. Dua teori ini akan dielaborasi untuk menjelaskan fenomena perilaku tertentu, yang dalam hal ini adalah perilaku tidak patuh.

Compliance menurut Green dan Kreuters (2005) adalah perubahan-perubahan dalam perilaku karena permintaan langsung (changes in behavior that are elicited by direct request). Sedangkan obedience suatu tindakan yang merespon permintaan otoritas tertentu (an act in response to a request from authority).<sup>26</sup> Compliance dikembangkan oleh Green dan Kreuters (2005), yang

---

<sup>25</sup>Budi Winarno, *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. *Op.Cit.* Hlm 142.

<sup>26</sup> Green, L.W. & Kreuter, M. W.. *Health Program Planning: An Educational and Ecological Approach*. Fourth Edition. NewYork: McGraw-Hill. 2005

menurutnya kepatuhan adalah ketaatan melakukan suatu yang dianjurkan atau respon yang diberikan terhadap situasi di luar subyek. Kepatuhan adalah berperilaku atau berperan aktif.) dan perilaku tidak patuh (non compliance). Sehingga dalam penelitian ini, ketidaktaatan pelaku usaha penatu adalah segala tindakan pelaku usaha penatu dalam melakukan proses pelaksanaan usaha yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku baik penggunaan bahan baku detergen kepengurusan izin, hingga pengelolaan limbah cair.

Kepatuhan pada dasarnya dipengaruhi oleh pengaruh intrapersonal dan pengaruh interpersonal. Dua pengaruh tersebut adalah faktor potensial dalam meningkatkan kepatuhan. Forgas & Williams (dikutip dari Chen dkk, 2006) berpendapat bahwa peningkatan kepatuhan adalah suatu proses mempengaruhi seseorang melalui interaksi sosial strategik, yang dengan demikian pengaruh sosial memainkan peran yang penting dalam proses tersebut.<sup>27</sup>

Ketidaktaatan pelaku usaha dapat dilihat dari proses operasi usaha yang dilakukan apakah sesuai atau tidak dengan peraturan yang berlaku khususnya dalam hal ini terkait kebijakan pengendalian lingkungan hidup pada pengelolaan limbah cair usaha penatu.

Teori kepatuhan awalnya diperkenalkan oleh Stanley Milgram yang menyebutkan bahwa kepatuhan merupakan sebagian bentuk dari persesuaian (conformity).<sup>28</sup> Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi

---

<sup>27</sup> Forgas, J.P. and Williams, K.D., *Social influence: Direct and indirect processes*. Psychology Press. 2016

<sup>28</sup> Milgram, S. "Behavioral Study of Obedience". *Journal of Abnormal and Social Psychology*. Yale University. 1963.

mempengaruhi kepatuhan, menurut milgram faktor faktor tersebut adalah sebagai berikut.

### 1. Status Lokasi

Menurut Shaw (1979) kepatuhan berhubungan dengan prestige seseorang di mata orang lain.<sup>29</sup> Demikian juga dengan lokasi. Apabila seseorang percaya bahwa lembaga yang menyelenggarakan penelitian adalah lembaga yang memiliki status keabsahan, prestise, dan kehormatan, maka lembaga atau organisasi tersebut akan dipatuhi oleh anggota organisasi. Prestige adalah reputasi atau pengaruh yang timbul dari keberhasilan, prestasi, pangkat, atau atribut lain yang menguntungkan. Perbedaan atau reputasi yang melekat pada seseorang atau sesuatu dan dengan demikian memiliki cap untuk orang lain atau untuk masyarakat.

### 2. Tanggung Jawab Personal

Bertanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Manusia yang bertanggung jawab adalah manusia yang dapat menyatakan diri sendiri bahwa tindakannya itu baik dalam arti menurut norma umum, sebab baik menurut seseorang belum tentu baik menurut pendapat orang lain. Dengan kata lain, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Pada percobaan Milgram, didapatkan bahwa ketika tanggung jawab personal berkurang maka ketaatan meningkat. Hal ini berhubungan dengan teori

---

<sup>29</sup> Shaw, M.E. *The Psychology Of Small Group Behavior*. New Delhi: The McGraw-Hill Publishing Company Ltd. 1979.

agency Milgram yang menyatakan bahwa kepatuhan dapat diciptakan melalui seseorang yang memasuki status sebagai agen (agentic state) dimana terdapat pengalihan tanggung jawab dimana tanggung jawab dari seseorang ini dilepaskan dan diberikan kepada figur otoritas selaku pemberi perintah.

### 3. Legitimasi Figur Otoritas (Keabsahan Figur Otoritas)

Legitimasi dapat diartikan seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan atau kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin. Faktor penting yang dapat menimbulkan kepatuhan sukarela adalah penerimaan seseorang akan ideologi yang mengabsahkan kekuasaan orang yang berkuasa dan membenarkan intruksinya.

Menurut Anderson (2008), kekuasaan bisa menjadi legitimate (sah) apabila diterima oleh anggota dari masyarakat.<sup>30</sup> Otoritas adalah kekuasaan yang diterima oleh orang lain sebagai keabsahan atau sesuatu yang sah yang muncul dari pelaksanaan kekuasaan dan kepercayaan konstituen bahwa kekuasaan itu sah.

Konsep otoritas yang sah berhubungan erat dengan konsep kekuasaan. Kekuasaan pada dasarnya adalah kapasitas untuk mempengaruhi perilaku dari anggota-anggota lainnya di dalam masyarakat. Namun otoritas tidak hanya mengenai kekuasaan saja, karena tergantung kepada pengakuan (recognition) dari anggota-anggota “kelas bawah” (subordinate members) dalam masyarakat sehingga seseorang yang mempunyai otoritas dapat secara legitimate memberikan resep (prescribe) tentang pola-pola perilaku yang harus diikuti oleh individu-individu di

---

<sup>30</sup> Anderson, Margaret L. (2008). *Sociology, Understanding a Diverse Society*. Thompson Learning, Inc. : California 2008.

dalam masyarakat. Adanya otoritas yang sah yang dimiliki atasan akan membuat bawahan taat kepada atasan dan perintahnya. Jika bawahan menyadari akan otoritas sah pimpinannya maka hal itu akan membuat anggota taat terhadap perintah dan aturan yang ada.

#### 4. Status Figur Otoritas

Status adalah tingkatan dalam sebuah kelompok. Status sosial adalah kedudukan social seseorang dalam kelompok masyarakat (meliputi keseluruhan posisi sosial yang terdapat dalam kelompok masyarakat). Status dibagi menjadi 3 yaitu Ascribed Status, Achieved Status, Assigned Status. Seseorang yang memiliki status dan kekuasaan social lebih tinggi akan lebih dipatuhi daripada seseorang dengan status sosial yang sama. Dalam perobaan yang dilakukan Milgram ditemukan bahwa orang lebih patuh jika seseorang yang memberikan perintah adalah orang yang terlihat profesional.

Simbol status adalah penggunaan symbol atau lambang untuk menunjukkan kedudukan seseorang dalam masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk tingkah lakusuai dengan status yang dimilikinya. Saat pemberi perintah adalah orang biasa, kepatuhan menurun ke tingkat 20%. Hal ini mengindikasikan bahwa peran sosial seseorang memiliki kewenangan yang cukup dan prestise untuk mengamankan ketaatan, terlepas dari konteks social.<sup>31</sup> Peranan sosial merupakan aspek yang timbul dari status (kedudukan). Peranan adalah perilaku yang diharapkan oleh pihak lain dalam melaksanakan kewajiban sesuai dengan status

---

<sup>31</sup> Kokot, Amy. Milgram's Follow-Up Studies to the Obedience Experiment. Retrieved from [http://www.mtholyoke.edu/~apkokot/followup.h tm](http://www.mtholyoke.edu/~apkokot/followup.htm).(2001)

yang dimilikinya. Status dan peranan tidak dapat dipisahkan karena peranan selalu melekat sesuai dengan status yang diembannya.

#### 5. Dukungan Sesama Rekan

Seseorang cenderung berperilaku sama dengan rekan atau sesama dalam lingkungan sosialnya. Orang cenderung bersama sesuai dengan kelompok sosialnya misalnya umur, jenis kelamin, ras, agama, hobi, pekerjaan cenderung bertindak dan berperilaku seperti anggota dari kelompok tersebut. Salah satu faktor penyebab ketidakpatuhan adalah kehadiran atau keberadaan rekan yang menolak untuk patuh.<sup>32</sup> Jika seseorang memiliki dukungan sosial dari teman mereka yang tidak patuh, maka kepatuhan juga cenderung berkurang. Lingkungan yang tidak patuh akan memudahkan seseorang untuk berbuat ketidakpatuhan sehingga sama dengan lingkungannya meskipun kepatuhan adalah sesuatu yang penting<sup>33</sup>.

#### 6. Kedekatan Figur Otoritas

Salah satu faktor yang jelas dalam percobaan Milgram tentang kepatuhan ini adalah kehadiran atau pengawasan langsung dari seorang figur otoritas. Bila seorang figur otoritas meninggalkan ruangan dan memberikan intruksinya lewat telepon, kepatuhan akan menurun<sup>34</sup>. Lebih mudah untuk melawan perintah dari figur otoritas jika mereka tidak dekat<sup>35</sup>. Sebaliknya, ketika sosok otoritas dekat maka ketaatan adalah cenderung lebih tinggi. Dengan kehadiran figur otoritas,

---

<sup>32</sup> Encina, G.B. Milgram's Experiment on Obedience to Authority. Retrieved from <http://nature.berkeley.edu/ucce50/aglabor/7/article/article35.htm>. (2004).

<sup>33</sup> Fernald, Dodge. Psychology. Retrieved from <http://www.prenhall.com/fernald/chapter/fern4.html>. (2007)

<sup>34</sup> Atkinson. Pengantar Psikologi. Nurdjannah Taufik. Jakarta: Erlangga. (1983)

<sup>35</sup> Dewey, Russell A. Obedience: Milgram. Retrieved from [http://www.intropsych.com/ch15\\_social/milgram\\_1963\\_obedience.html](http://www.intropsych.com/ch15_social/milgram_1963_obedience.html). (2007).

maka dapat mengawasi secara langsung dan memberikan instruksi langsung mengenai prosedur dan juga arahan mengenai apa yang harus dilakukan.

### **1.6.3. Pembangunan berkelanjutan**

Saat ini, pelestarian alam dan lingkungan hidup menjadi perhatian utama di tingkat global. Indonesia memiliki kewajiban moral untuk mengelola sumber daya alamnya dengan bijak. Selain itu, kesadaran masyarakat nasional tentang pentingnya melestarikan lingkungan telah meningkat. Kewajiban dan kesadaran akan kelestarian lingkungan diterjemahkan dalam kebijakan pembangunan yang berkelanjutan di tingkat nasional. Contohnya adalah kebijakan yang dikenal sebagai ekonomi hijau dan ekonomi biru. Pembangunan sektor ekonomi, pembangunan sektor sosial, dan perlindungan lingkungan harus diimbangi dengan pembangunan berkelanjutan.

Berikut beberapa pengertian mengenai pembangunan berkelanjutan. Menurut Ordóñez dan Duinker dalam Wibowo (2014) menyebutkan bahwa Pembangunan berkelanjutan adalah pertama sebuah kapasitas dalam memelihara stabilitas ekologi, sosial dan ekonomi dalam transformasi jasa biosfir kepada manusia.<sup>36</sup> *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources* (IUCN) (1980) dalam *World Conservation Strategy* menyampaikan bahwa untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, pelaksanaan pembangunan harus mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan, sosial ekonomi berdasarkan sumber daya hayati dan mempertimbangkan manfaat serta kerugian jangka panjang dari

---

<sup>36</sup> Wibowo, A. B. Pengembangan Kawasan Minapolitan Berkelanjutan Berbasis Perikanan Budidaya Ikan Air Tawar di Kabupaten Magelang (*Doctoral dissertation, Program Pascasarjana UNDIP*). (2014)

sebuah tindakan alternatif.<sup>37</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pembangunan Berkelanjutan diartikan sebagai upaya sadar dan terencana yang mengkolaborasi aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin integritas serta keselamatan, kapasitas, kesejahteraan dan mutu lingkungan hidup bagi generasi saat ini dan mendatang.

Pembangunan berkelanjutan adalah strategi pembangunan yang pemanfaatan sumber daya alam dan manusia, potensi investasi, pengembangan IT, dan transformasi kelembagaan dilakukan secara simultan dan seimbang, yang harus memperhatikan potensi masa kini dan masa depan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Tidak ada makhluk yang bisa hidup sendiri. Dalam kehidupan tumbuhan dan hewan, aspek lingkungan memegang peranan yang sangat mendasar. Seperti makhluk hidup lainnya, manusia sangat membutuhkan lingkungan yang baik untuk dapat bertahan hidup, untuk itu manusia harus terus menjaga lingkungan hidup agar tetap lestari.

Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas, kondisi lingkungan justru semakin memburuk. Keadaan ini sering terjadi di kawasan perkotaan dan pusat industri. Pencemaran air dan udara merupakan penyebab utama penurunan kualitas lingkungan.<sup>38</sup> Manusia mempunyai hubungan yang sangat erat dengan lingkungan. Pada masa Orde Baru, masyarakat Indonesia

---

<sup>37</sup> McCormick, J., The origins of the world conservation strategy. *Environmental Review*, (1986), 10(3), 177-187.

<sup>38</sup> Dwiyatmo, K. *Pencemaran Lingkungan dan Penanganannya*. (Yogyakarta: PT. Citra Aji Parama, 2007).

terlihat sangat peduli terhadap lingkungan hidup. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah mengenai pembangunan ramah lingkungan yang dikomunikasikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan berwawasan lingkungan meliputi pembangunan lingkungan alam, lingkungan fisik, dan kesadaran masyarakat berdasarkan pengetahuan dan pemahaman tentang sikap dan perilakunya terhadap kelestarian lingkungan terus diupayakan untuk mencapai keberlanjutan lingkungan.

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah serangkaian tujuan dalam kesepakatan bersama untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi segala sesuatu yang membuat bumi ini layak huni, dan memastikan semua orang menikmati perdamaian dan kesejahteraan, sekarang dan di masa depan. Target-target tersebut secara resmi diadopsi oleh seluruh Negara Anggota PBB pada tahun 2015 untuk periode 2016-2030 sebagai respons terhadap bukti empiris dan ilmiah bahwa dunia memerlukan pendekatan berkelanjutan yang jauh lebih kuat. Tujuannya adalah untuk memberikan kerangka kerja yang dapat diterima secara ilmiah, dapat diterima secara politis, dan intuitif kepada masyarakat. Tujuan-tujuan ini memberi kita peluang terbaik untuk memastikan kerja sama dan keselarasan yang diperlukan untuk mengambil pendekatan global guna memastikan masa depan yang adil, sehat, dan sejahtera bagi diri kita sendiri, keturunan kita..<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Morton, S., Pencheon, D., & Squires, N. Sustainable Development Goals (SDGs), and their implementation A national global framework for health, development and equity needs a systems approach at every level. *British medical bulletin*, (2017). 1-10.

Pilar pembangunan lingkungan hidup merupakan pilar yang mengusung visi dan misi SDGs untuk menciptakan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Secara khusus, Tujuan 6 berkaitan dengan limbah atau limbah industri yang mempunyai dampak terbesar terhadap keadaan bumi. Tujuan keenam adalah menciptakan ketersediaan dan pengelolaan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan untuk mencapai enam tujuan yaitu;

1. Mencapai akses universal dan merata untuk air minum yang terjangkau dan aman bagi semua,
2. Akses sanitasi dan kebersihan dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka,
3. Meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi menghilangkan pembuangan dan meminimalkan pelepasan material kimia berbahaya dan secara signifikan meningkatkan daur ulang serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global,
4. Meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sector untuk mengatasi kelangkaan air dan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air,
5. Menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu
6. Melindungi dan merestorasi ekosistem yang terkait dengan sumber daya air baik pegunungan, hutan, sungai dan lain-lain.<sup>40</sup>

Sangsoko menyatakan bahwa penyediaan air bersih adalah air yang disadap untuk keperluan rumah tangga, perdagangan, industri, dan lain-lain, dan parameter umumnya adalah kekeruhan, total padatan terlarut, senyawa-senyawa beracun, mutu bakteri. Sutrisno dalam Astuti (2014) menyatakan pada tinjauan tentang standar kualitas air bersih, secara umum dapat dilihat bahwa penyimpangan terhadap standar air yang telah ditetapkan dapat mengakibatkan kurangnya

---

<sup>40</sup> Nurdiani, L. N., & Muslim, A.. Pengelolaan Sampah di Pondok Pesantren Ibnul Qoyyim Putri Sebagai Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Pengendalian Pencemaran Lingkungan (JPPL)*, (2022), 4(2), 38-50.

penerimaan masyarakat terhadap air tersebut, yang pada akhirnya dapat mendorong masyarakat untuk mencari sumber air lain yang berpotensi buruk.<sup>41</sup>

Adanya bau, suhu, rasa, dan kekeruhan yang melebihi standar yang ditetapkan dapat menimbulkan kekhawatiran tentang adanya bahan kimia yang dapat berdampak buruk bagi masyarakat. Akses terhadap air bersih dan sanitasi penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang baik. Kurangnya jumlah air bersih dan sanitasi yang memadai merupakan awal dari berbagai masalah kesehatan di masyarakat, seperti stunting, kematian bayi dan ibu, penularan berbagai virus dan penyakit lainnya. Adanya kualitas air yang buruk tersebut disebabkan oleh terjadinya pencemaran air yang meluas.

Air bersih sangat penting bagi kehidupan seluruh umat manusia. Sanitasi yang buruk dan kurangnya air bersih akan menimbulkan banyak permasalahan bagi masyarakat terutama dalam hal kesehatan. Akibat permasalahan tersebut, Indonesia mengalami kerugian yang besar baik dari segi sumber daya manusia bahkan sumber daya perekonomian. Hal ini tentu berdampak pada pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah tindakan yang melibatkan partisipasi banyak masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Indonesia telah berpedoman pada Target SDG 6 tentang sanitasi dan penyediaan air minum, yang mencakup target dan diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030.

---

<sup>41</sup> Astuti, N., Penyediaan Air Bersih Oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Sangatta Kabupaten Kutai Timur, *Journal Administrasi Negara*, (2014), 3(2), 678-689.

### 1.7. Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep adalah sebuah gejala gejala atau peristiwa yang menjadi sebuah konsep pokok yang diamati dalam penelitian, disertai dengan oprasionalisasi tolok ukur atas konsep tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka operasionalisasi konsep dalam penelitian ini akan dilihat berdasarkan model Implementasi Kebijakan dari George Edward III dengan Variabel sebagai berikut:

#### 1. Komunikasi

a. Transmisi, yang dimaksud transmisi merupakan komunikasi yang antar organisasi dan aktifitas pelaksana Koordinasi serta komunikasi yang terjadi antara pihak-pihak yang terkait dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan limbah cair usaha penatu di Kota Semarang. Transmisi komunikasi ini dapat dilihat melalui keberjalanan DLH Kota Semarang berikut:

- 1) Program kegiatan penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran, pengendalian polusi udara, limbah padat dan limbah cair, dan pengendalian pencemaran limbah usaha skala kecil oleh bidang 3 DLH Kota Semarang.
- 2) Program kegiatan peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup oleh bidang 4 DLH Kota Semarang.
- 3) Sosialisasi lainnya dilakukan dengan memberikan akses kemudahan dalam mengakses informasi proses pembuatan dokumen lingkungan oleh Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang melalui website DLH Kota Semarang.

b. Kejelasan informasi, dimana dalam indikator ini komunikasi yang disampaikan dan diterima oleh DLH Kota Semarang serta pelaksana kebijakan pengendalian lingkungan hidup terkait pengelolaan limbah cair usaha penatu ini harus jelas dan tidak membingungkan.

c. Konsistensi komunikasi dari perintah yang diberikan pemerintah pada pelaksana yaitu pemilik usaha penatu yang ada di Kota Semarang juga menjadi indikator dalam implementasi kebijakan ini.

## 2. Sumber daya

Sumber daya yang dimaksud adalah ketersediaan sumber daya manusia, sumber daya finansial serta ketersediaan sarana dan prasarana dalam implementasi kebijakan pengelolaan limbah cair pada usaha penatu di Kota Semarang. Sumber daya manusia yang berkualitas baik itu dalam badan pelaksana kegiatan maupun masyarakat sebagai sasaran peraturan akan semakin mendukung dalam implementasi peraturan tersebut. Kemampuan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sumber dana dan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan limbah cair pada usaha penatu di Kota Semarang. Sumber daya tersebut terdiri dari :

- a. Jumlah SDM di Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang untuk melaksanakan implementasi kebijakan pengendalian lingkungan hidup di daerah.
- b. SDM di Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang memenuhi standar kualifikasi untuk mengawaki Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

- c. Alokasi dana untuk penanganan kebijakan pengendalian lingkungan hidup terkait pengelolaan limbah cair.
- d. Dukungan sarana prasarana, menunjang kebijakan pengendalian lingkungan hidup di daerah dalam pengelolaan limbah cair.

### 3. Disposisi

Sikap pelaksana harus memiliki pengetahuan, keterampilan, proses maupun teknik yang bisa memperlancar keberhasilan suatu tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Pelaksana harus paham terhadap kebijakan pengelolaan limbah cair pada usaha penatu di Kota Semarang. Ketegasan sikap aparat pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan tersebut di Kota Semarang dimana pelaksana juga harus memiliki kesadaran penuh untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

1. Pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.
2. Dukungan dari Instansi lain, LSM, serta masyarakat dalam implementasi kebijakan pengendalian lingkungan hidup terkait pengelolaan limbah cair.
3. Pelaksanaan program memerlukan hubungan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian lingkungan hidup terkait pengelolaan limbah cair.

### 4. Struktur Birokrasi

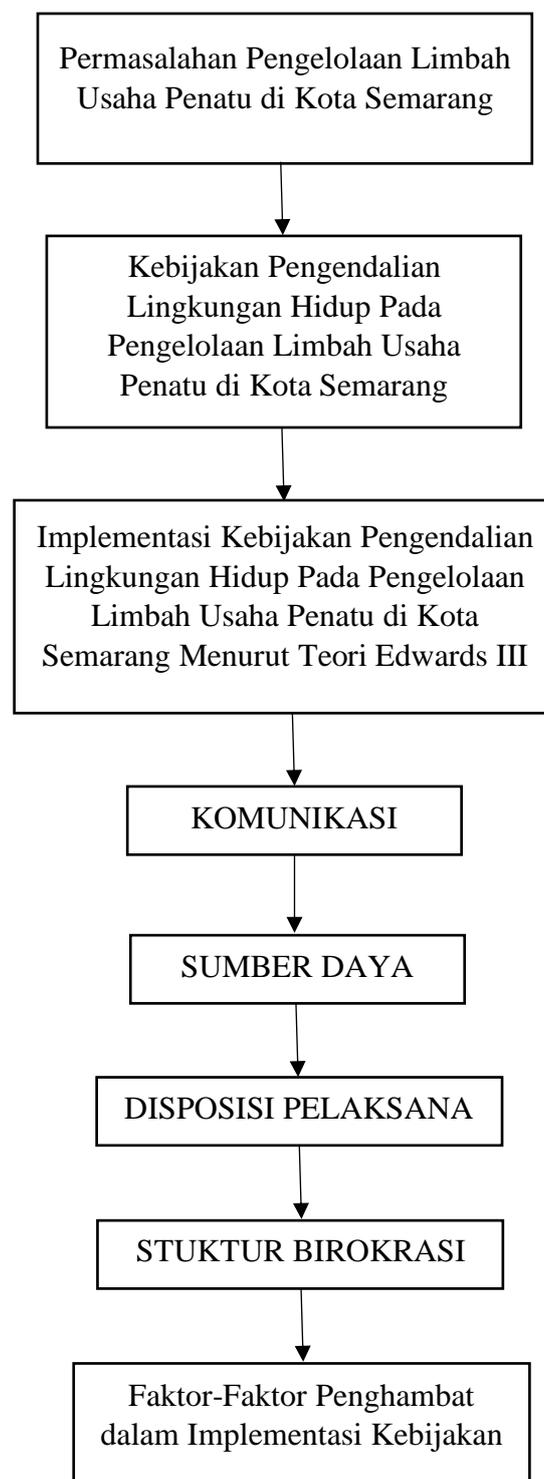
Struktur birokrasi memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Dalam struktur birokrasi terdapat juga fragmentasi dalam struktur birokrasi yang

berupa penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas- aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan limbah cair pada usaha penatu di Kota Semarang diantaranya :

- a. SOP Kebijakan terkait pengendalian lingkungan hidup pengelolaan limbah cair yang dijadikan pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam menangani pengelolaan limbah cair usaha penatu.
- b. Keberjalanan program implementasi kebijakan pengendalian lingkungan hidup pada setiap bidang yang telah terbagi dalam pengelolaan limbah cair.

## 1.8 Kerangka Berpikir

**Gambar 1.3**  
**Kerangka Berpikir**



## **1.9. Metode Penelitian**

### **1.9.1. Desain Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* yang holistik, kompleks, dan rinci.<sup>42</sup> Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan yang berdasarkan ilmu pengetahuan, tujuannya menggambarkan gejala, keadaan individu maupun kelompok tertentu.

Dalam penelitian ini dilakukan upaya untuk dapat memberikan deskripsi dan gambaran dari implementasi kebijakan pengendalian lingkungan hidup pada pengelolaan limbah cair usaha penatu di Kota Semarang serta berupaya menggalikan faktor-faktor penghambat dari berjalannya implementasi kebijakan tersebut.

### **1.9.2. Subjek dan Objek Penelitian**

#### **A. Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah pelaku usaha penatu yang tersebar di Kecamatan Tembalang dan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang serta aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Selain itu masyarakat yang berada di kawasan sekitar usaha penatu juga menjadi subjek dari penelitian yang akan

---

<sup>42</sup> Eko Murdiyanto, Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal), (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Pers, 2020), hlm. 19.

dilakukan. Penentuan dalam sumber data pada penelitian ini adalah menggunakan teknik *purposeful sampling*. *Purposeful sampling* ini merupakan teknik pengambilan sampel dengan tujuan tertentu yang banyak digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mengidentifikasi dan memilih kasus-kasus yang kaya informasi terkait dengan fenomena yang diminati.<sup>43</sup> Dengan teknik ini, maka pemilihan informan berdasarkan karakteristik yang dibutuhkan untuk dapat menggambarkan masalah yang akan diteliti.

#### B. Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini usaha penatu yang ada di Kecamatan Tembalang dan Kecamatan Banyumanik. Objek tersebut dipilih dalam penelitian ini karena terdapat permasalahan dalam kebijakan pengelolaan limbah cair pada di Kota Semarang yang perlu dikaji lebih lanjut, yaitu implementasi dan hambatan dalam implementasi kebijakan pengendalian lingkungan hidup terkait pengelolaan limbah cair usaha penatu yang penting untuk diketahui.

#### 1.9.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data merupakan hal yang akan dipakai sebagai dasar, yang dapat berasal dari penelitian lapangan, keperpustakaan ataupun yang lainnya.<sup>44</sup>

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder sebagai berikut:

##### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang di dapatkan tanpa perantara atau didapatkan langsung di lapangan. Data primer mencakup beberapa bentuk yaitu

---

<sup>43</sup> Palinkas, L. A., dkk. *Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. Administration and policy in mental health and mental health services research*, (2015), 42, 533-544.

<sup>44</sup> S Una. *Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi)*. (Jambi: Syariah Fress, 2014)

hasil wawancara, observasi lapangan, dan data terkait informan. Data primer penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan pengelolaan limbah cair di Kota Semarang yang dilakukan dengan observasi di lapangan. Selain itu, data primer ini dapat diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan, yaitu pengelola usaha penatu, masyarakat sekitar terdampak usaha penatu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta aparaturnya yang ada di dalam DLH Kota Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dapat diperoleh dari selain data utama ataupun observasi lapangan. Data sekunder ini dapat diperoleh dari buku, laporan, serta dokumen yang diperoleh. Selain itu, data sekunder dapat didapatkan melalui internet, jurnal, repository (skripsi, tesis, dan disertasi). Data sekunder perlu diperhatikan sumbernya untuk menjamin validitas dari sebuah data.

#### **1.9.4. Teknik Pengumpulan Data**

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui memberikan pertanyaan kepada responden dengan bertatap muka atau secara langsung, sehingga peneliti dapat melihat mimik muka untuk melengkapi kata-kata yang diberikan responden. Dalam wawancara, dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang telah disiapkan, namun tidak menutup kemungkinan akan ada tambahan pertanyaan berdasarkan kondisi tetapi juga tidak menyimpang dari pokok bahasan. Wawancara yang dilakukan

untuk penelitian ini juga bertujuan memperoleh informasi suatu peristiwa dan keadaan di lapangan pada beberapa pengelola usaha penatu di Kecamatan Tembalang dan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang yang akan dipilih berdasarkan segmentasi usaha penatu besar (waralaba), usaha penatu sedang, dan usaha penatu rumahan. Selain itu wawancara juga akan dilakukan pada masyarakat sekitar terdampak usaha penatu, Lembaga Swadaya Masyarakat terkait, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang yaitu aparatur atau petugas yang terlibat dalam implementasi kebijakan lingkungan hidup pengelolaan limbah usaha penatu Kota Semarang.

b. Observasi

Metode observasi merupakan mengumpulkan data terhadap objek penelitian. Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah observasi partisipatif, yang mana dilakukan pengumpulan data langsung dengan subjek penelitian untuk mengamati yang terjadi di lapangan dengan melihat langsung bagaimana pengelolaan limbah usaha penatu yang dilakukan pengusaha penatu di Kota Semarang khususnya pada Kecamatan Tembalang dan Kecamatan Banyumanik.

#### **1.9.5. Teknik Analisis Data**

a. Reduksi Data

Menurut Miles, Reduksi data adalah proses pemilihan, memfokuskan, menyederhanakan, pengubahan data kasar yang berasal dari laporan hasil lapangan. Tujuannya untuk memilih dan menentukan data

yang dianggap relevan dengan tema skripsi yang disajikan.<sup>45</sup> Dalam penelitian ini hasil dari pengumpulan data baik dari data primer dan data sekunder akan dilakukan reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih unsur-unsur kunci, memusatkan perhatian pada unsur-unsur penting, mencari tema dan pola, menghilangkan yang tidak perlu.

Reduksi data dapat dilakukan dengan abstraksi. Abstraksi merupakan upaya untuk membuat rangkuman inti, proses, dan pernyataan yang perlu ditangkap agar tetap ada dalam data penelitian. Dengan kata lain, proses reduksi data ini dilakukan secara terus menerus selama melakukan penelitian guna mendapatkan poin inti dari data yang diperoleh selama proses data mining.

#### b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sebuah proses untuk dapat membuat kesimpulan. Penyajian data terkait masalah implementasi Kebijakan Pengendalian Lingkungan hidup dilakukan dengan mengumpulkan data yang tersedia. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi terstruktur yang memungkinkan penarikan kesimpulan. Sebab, data yang diperoleh selama penelitian kualitatif seringkali berbentuk naratif sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Penyajian data dilakukan agar gambaran keseluruhan atau bagian-bagian dari gambaran keseluruhan dapat terlihat. Pada tahap ini akan dilakukan upaya

---

<sup>45</sup> Saldana., Miles & Huberman. *Qualitative Data Analysis*. (America: SAGE Publications. 2014)

untuk mengklasifikasikan dan menyajikan data berdasarkan isu utama, dimulai dengan mengkodekan setiap sub isu utama.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Verifikasi dan membuat kesimpulan merupakan kegiatan mengartikan dan menyajikan data yang nantinya akan ditampilkan. Temuan-temuan tersebut dapat dipahami sebagai suatu bentuk utuh yang diambil pada melakukan penelitian. Pada bagian ini akan ditarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh. Kegiatan ini bertujuan untuk memahami data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan. Kesimpulan dapat diambil dengan membandingkan relevansi pernyataan tentang topik penelitian dengan makna yang terkandung dalam konsep dasar penelitian.